

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

##### 2.1.1 Teori *Stakeholder*

Teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) menjelaskan bahwa perusahaan merupakan entitas yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari sistem sosial yang lebih luas dan saling berhubungan dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberlangsungan kegiatan usaha. Teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) berawal dari sudut pandang kapitalisme modern yang menitikberatkan pada hubungan yang saling berkaitan antara perusahaan dan berbagai pihak yang terlibat, seperti pelanggan, pemasok, karyawan, pemegang saham, masyarakat, pemerintah dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kepentingan organisasi.

Menurut teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*), perusahaan tidak hanya bertanggung jawab untuk menciptakan nilai bagi pemegang saham, tetapi juga bagi seluruh pemangku kepentingan. Keberhasilan dan keberlanjutan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan perusahaan menghasilkan laba, tetapi juga bagaimana perusahaan mampu memberi manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi pemangku kepentingannya.

Menurut Edward Freeman John McVea et al. (2001), dalam bukunya *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, *stakeholder* didefinisikan sebagai setiap individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Edward Freeman John McVea et al. (2001), menegaskan bahwa

perusahaan harus memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan agar dapat mencapai keberlanjutan jangka panjang. Dukungan dari pemangku kepentingan karena tanpa adanya legitimasi sosial dan kepercayaan publik, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan kinerja dalam jangka panjang.

Donaldson & Preston (1995), menjelaskan bahwa teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) memiliki tiga dimensi utama, yaitu deskriptif, instrumental, dan normatif. Secara deskriptif, teori ini menggambarkan bagaimana perusahaan berinteraksi dengan berbagai kelompok pemangku kepentingan. Secara instrumental, teori ini menjelaskan bahwa pengelolaan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan akan berdampak positif pada kinerja perusahaan. Sedangkan secara normatif, teori ini berlandaskan pada prinsip moral bahwa setiap pemangku kepentingan memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan dihargai kepentingannya.

Sejalan dengan teori *stakeholder*, perusahaan perlu memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan karena dukungan *stakeholder* menjadi faktor penting bagi keberlangsungan perusahaan. Hoetama & Carolina (2024), menyatakan bahwa *stakeholder* tidak hanya mempertimbangkan informasi keuangan, tetapi juga informasi non-keuangan perusahaan dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut menunjukkan bahwa berbagai kebijakan dan aktivitas perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan serta penerapan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, dapat mempengaruhi persepsi dan kepercayaan *stakeholder*. Penelitian yang dilakukan Elamer et al. (2024), juga mengungkapkan bahwa

perusahaan yang mampu memenuhi kepentingan *stakeholder* melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab akan memperoleh dukungan dan kepercayaan yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

### **2.1.2 Penghindaran Pajak**

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu strategi manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan secara legal dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum. Berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal dan melanggar undang-undang. Meskipun penghindaran pajak (*tax avoidance*) bersifat legal, namun sering kali menimbulkan perdebatan dari sisi etika, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan moral terhadap peraturan perpajakan.

Praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah sebagai pihak yang berupaya memaksimalkan penerimaan negara dan perusahaan yang ingin meminimalkan beban biaya untuk memperoleh laba yang lebih besar. Dalam konteks ekonomi modern, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang signifikan bagi perusahaan, sehingga perusahaan melakukan manajemen pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) agar laba yang dihasilkan tetap optimal

Menurut Pohan (2019), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan dari peraturan perpajakan yang masih bersifat *grey area* atau belum diatur secara tegas dalam undang-undang.

Menurut Suandy (2016), penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan sebuah usaha wajib pajak untuk mengurangi beban pajak secara legal melalui perencanaan pajak dan pemilihan alternatif transaksi yang memiliki beban pajak rendah. Penghindaran pajak dilakukan perusahaan untuk meminimalkan beban pajak secara sah, namun tetap perlu memperhatikan etika dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan risiko reputasi bagi perusahaan.

Perbedaan kepentingan antara perusahaan dan pemerintah menjadi penyebab utama munculnya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Karena pajak merupakan komponen biaya yang signifikan, maka pengelolaan pajak melalui *tax planning* sering digunakan untuk mengefisienkan beban tersebut. Meskipun *tax avoidance* bersifat legal, praktik ini menimbulkan dilema etika dan moral. Dalam konteks teori pemangku kepentingan (*stakeholder theory*) seperti yang telah dikemukakan oleh Edward Freeman John McVea et al. (2001), perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham, namun juga kepada pemerintah dan masyarakat luas.

Menurut Marks (2007), dalam Kurniasih et al. (2013) mengklasifikasikan penghindaran pajak menjadi tiga, yaitu

1. *Substantive Tax Planning*, yaitu pengalihan subjek dan atau objek pajak ke negara dengan tarif pajak rendah (*tax haven country*) untuk memanfaatkan perbedaan kebijakan pajak antarnegara.
2. *Formal tax planning*, yaitu penghindaran pajak tanpa mengubah substansi ekonomi transaksi, yang dilakukan dengan pemilihan bentuk hukum atau metode akuntansi yang sah untuk menekan beban pajak.

3. *General Anti-Avoidance Rule (GAAR)*, yaitu ketentuan anti penghindaran pajak yang ditetapkan pemerintah untuk mencegah praktik seperti *transfer pricing*, *thin capitalization*, dan *treaty shopping*, dan memastikan setiap transaksi memiliki substansi ekonomi yang wajar.

Menurut Elamer et al. (2024), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, yaitu perbandingan antara kas pajak yang dibayarkan dengan laba sebelum pajak (*pre-tax income*). Namun, dalam penelitian lain, penghindaran pajak juga diukur menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)*, yaitu perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Penggunaan ETR dinilai lebih relevan karena mampu mencerminkan beban pajak perusahaan secara akuntansi serta memiliki ketersediaan data yang lebih mudah diperoleh dari laporan laba rugi.

### **2.1.3 Nilai Perusahaan**

Nilai perusahaan merupakan salah satu indikator penilaian terhadap seberapa besar kinerja perusahaan dan prospek masa depan. Nilai perusahaan mencerminkan keberhasilan manajemen dalam mengelola sumber daya perusahaan untuk menciptakan keuntungan serta meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Menurut Sartono (2010), nilai perusahaan adalah harga yang dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual. Hal ini berarti bahwa nilai perusahaan mencerminkan persepsi pasar terhadap kemampuan perusahaan menciptakan nilai ekonomi di masa depan.

Brigham dan Houston (2019), menjelaskan tujuan utama manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan, karena nilai yang tinggi menandakan

tingkat kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan. Peningkatan nilai perusahaan menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil manajemen seperti kebijakan investasi, pendanaan, dan dividen dinilai positif oleh pasar.

Selanjutnya, nilai perusahaan menggambarkan bagaimana investor menilai kondisi perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan yang mempunyai kinerja keuangan yang baik, dan mempunyai prospek usaha yang menjanjikan cenderung lebih menarik bagi investor. Minat investor yang tinggi dapat meningkatkan harga saham sehingga meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, nilai perusahaan sering dijadikan tolak ukur keberhasilan manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan dan menciptakan kesejahteraan bagi pemegang saham.

Dalam penelitiannya Elamer et al. (2024), mendefinisikan nilai perusahaan sebagai hasil penilaian pasar terhadap keseluruhan ekonomi perusahaan, yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keuangan tetapi juga faktor non-keuangan seperti implementasi *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Perusahaan dengan kinerja ESG yang baik cenderung memiliki reputasi yang tinggi di mata investor, sehingga berdampak positif terhadap nilai perusahaan.

Nilai perusahaan dapat diukur dengan beberapa indikator keuangan, salah satunya *Tobin's Q*. *Tobin's Q* menggambarkan sejauh mana pasar menilai perusahaan dibandingkan dengan buku asetnya. Nilai *Tobin's Q* yang tinggi menunjukkan bahwa pasar memberikan penilaian positif terhadap prospek pertumbuhan dan efisiensi manajemen perusahaan, sedangkan nilai yang rendah mengindikasikan bahwa perusahaan belum mampu memaksimalkan potensi asetnya untuk menciptakan nilai.

Dalam penelitiannya Elamer et al. (2024), menggunakan proksi *Tobin's Q* untuk mengukur nilai perusahaan (*firm value*), karena dianggap mampu mencerminkan penilaian pasar terhadap efektivitas keputusan manajerial, kinerja keuangan, serta prospek keberlanjutan perusahaan di masa mendatang.

#### **2.1.4 *Environmental, Social, and Governance***

Konsep *Environmental, Social, and Governance* (ESG) merupakan pendekatan yang menekankan pentingnya keberlanjutan dalam kegiatan bisnis melalui tiga aspek, yaitu lingkungan (*Environmental*), sosial (*Social*), dan tata kelola (*Governance*). Implementasi ESG digunakan untuk mengukur komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

Menurut Elamer et al. (2024), implementasi ESG berperan penting dalam meningkatkan transparansi, reputasi, dan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Perusahaan yang memiliki kinerja ESG yang tinggi cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berisiko, termasuk dalam praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hal ini disebabkan karena penerapan ESG menekan pentingnya integritas, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam jangka panjang.

Di Indonesia, penerapan prinsip ESG didukung oleh regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang keuangan keberlanjutan, yang mewajibkan lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik untuk menyusun laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Laporan berkelanjutan berfungsi sebagai bentuk transparansi terhadap kinerja lingkungan,

sosial, dan tata kelola perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan (2023), melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan tahap II (2021-2025) menegaskan bahwa penerapan prinsip ESG merupakan bagian penting dari strategi bisnis nasional yang berorientasi pada keberlanjutan. Panduan tersebut menekankan bahwa perusahaan di Indonesia perlu memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola dalam proses pengambilan keputusan bisnis.

Aspek lingkungan dalam ESG mencakup tanggung jawab perusahaan dalam mengelola dampak kegiatan operasional terhadap lingkungan, seperti pengelolaan limbah. Aspek sosial mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan, konsumen, dan masyarakat. Sementara itu, aspek tata kelola berkaitan dengan sistem pengelolaan perusahaan yang transparan dan pengawasan internal yang baik.

Dalam penelitiannya Elamer et al. (2024), menggunakan Skor ESG untuk mengukur implementasi ESG. Penerapan ESG tidak hanya menjadi kewajiban moral dan sosial, tetapi juga strategi bisnis yang berkelanjutan untuk meningkatkan nilai perusahaan serta memperkuat kepercayaan investor terhadap praktik bisnis yang transparan dan bertanggung jawab.

Menurut Nurachman dan Soeratin (2025), perusahaan dengan penerapan ESG yang baik cenderung memiliki risiko yang rendah, hubungan yang baik dengan *stakeholder*, dan mampu meningkatkan keberlanjutan perusahaan dalam jangka waktu panjang. Prayogo et al. (2023), menjelaskan bahwa pengungkapan ESG dapat menjadi sinyal positif bagi investor, karena perusahaan tidak hanya berfokus

pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan dan kepentingan *stakeholder*.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul penelitian	Variabel	Hasil penelitian
1.	Naingolan et al. (2026)	Pengaruh Penghindaran Pajak dan Investasi Hijau terhadap Nilai Perusahaan <i>Healthcare</i> di BEI (2020 – 2024)	Variabel Dependen : Nilai Perusahaan  Variabel Independen : Penghindaran Pajak dan Investasi Hijau	Penghindaran pajak mempunyai dampak negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan karena meningkatkan risiko reputasi dan menurunkan kepercayaan investor. Sementara itu, investasi hijau tidak memberikan dampak signifikan terhadap nilai perusahaan.
2.	Trinurwati et al. (2026)	Pengaruh Faktor <i>Environmental Disclosure</i> , <i>Social Disclosure</i> , <i>Governance Disclosure</i> dan <i>Firm Size</i> terhadap Profitabilitas	Variabel Independen : <i>Environmental Disclosure</i> , <i>Social Disclosure</i> , <i>Governance Disclosure</i> dan <i>Firm Size</i>  Variabel Dependen : Profitabilitas	<i>Social disclosure</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan karena aktivitas sosial cenderung meningkatkan.
3.	Tri Wahyuningtias et al. (2025)	Analisis Penghindaran Pajak ( <i>Tax avoidance</i> ) Perusahaan Multinasional	Variabel Dependen : Penghindaran Pajak	<i>Transfer pricing</i> pada PT Adaro Energy Tbk digunakan sebagai praktik penghindaran pajak

No.	Peneliti	Judul penelitian	Variabel	Hasil penelitian
		(Studi Kasus PT Adaro Energy Tbk)	Variabel Independen : <i>Transfer pricing</i>	yang berpotensi mengurangi penerimaan pajak negara.
4.	Nurachman dan Soeratin (2025)	Analisis Penerapan ESG terhadap Nilai Perusahaan Berdasarkan Literatur Review Terindeks Sinta	Variabel Dependen : Nilai Perusahaan Variabel Independen : <i>Environmental, Social, and Governance (ESG)</i>	ESG memiliki pengaruh yang beragam terhadap nilai perusahaan. Aspek tata kelola berpengaruh positif signifikan, sedangkan aspek lingkungan dan sosial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan.
5.	Saputri et al. (2025)	Pengaruh <i>Tax Planning, Tax avoidance</i> , dan <i>Earnings Management</i> terhadap Nilai Perusahaan	Variabel Independen : <i>Tax Planning, Tax avoidance, Earnings Management</i> Variabel Dependen: Nilai Perusahaan	<i>Tax avoidance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Strategi pengelolaan pajak yang baik dinilai mampu meningkatkan nilai perusahaan.
6.	Kathan et al. (2025)	<i>What You See Is Not What You Get: ESG Scores and Greenwashing Risk</i>	Variabel Dependen : Greenwashing Risk Variabel Independen : ESG Score	ESG score berhubungan positif dengan risiko <i>greenwashing</i> . Perusahaan dengan ESG score tinggi cenderung memiliki risiko <i>greenwashing</i> yang lebih tinggi.
7.	Sneideriene & Legenzova (2025)	<i>Greenwashing Prevention in Environmental, Social, and Governance</i>	Variabel Independen : <i>ESG Disclosure dan Greenwashing</i>	<i>Greenwashing</i> dapat menurunkan kualitas pengungkapan ESG dan mempengaruhi

No.	Peneliti	Judul penelitian	Variabel	Hasil penelitian
		<i>(ESG) Disclosures : A Bibliometric Analysis</i>	Variabel Dependen : Kepercayaan <i>Stakeholder</i> dan Kualitas Pengungkapan ESG	kepercayaan <i>stakeholder</i> terhadap informasi yang disampaikan perusahaan. <i>Stakeholder</i> tidak hanya memperhatikan tingginya pengungkapan ESG, tetapi juga mempertimbangkan apakah implementasi ESG dilakukan secara nyata dan konsisten oleh perusahaan.
8.	Paramitha & Devi (2024)	Pengaruh <i>Environmental Social Governance (ESG) Score</i> dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan	Variabel Dependen : Nilai Perusahaan  Variabel Independen : <i>Environmental Social Governance (ESG) Score</i> Struktur Modal	<i>ESG Score</i> berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan struktur modal berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.
9.	Hoetama dan Carolina (2024)	Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan dengan ESG sebagai Variabel Pemoderasi	Variabel Dependen : Nilai Perusahaan  Variabel Independen : Penghindaran Pajak  Variabel Moderasi : ESG	Penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan ESG memperkuat hubungan tersebut.

No.	Peneliti	Judul penelitian	Variabel	Hasil penelitian
10.	Elamer et al. (2024)	<i>Corporate Tax avoidance and Firm Value : The Moderating Role of Environmental, Social, and Governance</i>	Variabel Dependen : Nilai Perusahaan  Variabel Independen : Penghindaran Pajak  Variabel Moderasi : ESG	Penghindaran pajak mempengaruhi nilai perusahaan, namun ESG dapat memoderasi hubungan ini dengan meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor terhadap perusahaan.
11.	Handayani dan Murniati (2023)	Perbandingan <i>Effective Tax Rate (ETR)</i> dan Rasio Koreksi Fiskal terhadap Aset sebagai Indikator <i>Tax avoidance</i>	Variabel Dependen : <i>Tax avoidance</i>  Variabel Independen : <i>Return on Asset (ROA)</i> Intensitas Aset Tetap, Intensitas Persediaan, Komisaris Independen, Komite Audit	ROA dan intensitas persediaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan intensitas aset tetap dan komite audit tidak berpengaruh.
12.	Xaviera & Rahman (2023)	Pengaruh Kinerja ESG terhadap Nilai Perusahaan dengan Siklus Hidup Perusahaan sebagai Moderasi: Bukti dari Indonesia	Dependen: Nilai Perusahaan  Independen: <i>ESG Score, Environmental Score, Social Score, Governance Score</i>	ESG secara agregat tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Secara parsial, <i>environmental score</i> berpengaruh negatif, <i>social score</i> tidak berpengaruh, dan <i>governance score</i> berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Siklus hidup perusahaan mampu

No.	Peneliti	Judul penelitian	Variabel	Hasil penelitian
				memoderasi hubungan ESG terhadap nilai perusahaan.
13.	Liesiana Laurenty dan Elsa Imelda (2023)	Pengaruh <i>Tax avoidance</i> terhadap Nilai Perusahaan dengan <i>Family Management</i> sebagai Variabel Moderasi	Variabel Dependen : Nilai Perusahaan  Variabel Independen : <i>Tax avoidance</i>  Variabel Moderasi : <i>Family Management</i>	Penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan karena mampu meningkatkan laba perusahaan dan memberikan respon positif dari investor.
14.	Prayogo et al. (2023)	ESG <i>Disclosure</i> dan <i>Retention Ratio</i> terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi	Variabel Dependen : Nilai Perusahaan  Variabel Independen : ESG <i>Disclosure</i> , <i>Retention Ratio</i>  Variabel Moderasi : Ukuran Perusahaan	<i>ESG Disclosure</i> dan <i>retention ratio</i> berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Namun, ukuran perusahaan mampu memoderasi hubungan <i>ESG disclosure</i> dan <i>retention ratio</i> terhadap nilai perusahaan.
15.	Aydogmus, Gulay, & Ergun (2022)	<i>Impact of ESG Performancer on Firm Value and Profitability</i>	Variabel Dependen : <i>Environmental Score</i> , <i>Social Score</i> , <i>Governance Score</i>	ESG secara keseluruhan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Secara individual, <i>Social score</i> , dan <i>Governance score</i> berpengaruh positif

No.	Peneliti	Judul penelitian	Variabel	Hasil penelitian
			Variabel Independen : Nilai Perusahaan dan Profitabilitas  Variabel Moderasi : <i>ESG Disclosure</i>	dan signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan <i>Environmental score</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
16.	Nafti, Kateb, dan Masghouni (2020)	<i>Tax evasion, Firm's Value and Governance: Evidence from Tunisian Stock Exchange</i>	Dependen: <i>Firm Value (Tobin's Q)</i> Independen: <i>Tax evasion (ETR)</i> Moderasi: <i>Family Management dan Ownership Concentration</i>	<i>Tax evasion</i> tidak berpengaruh langsung terhadap nilai perusahaan. <i>Family management</i> memoderasi hubungan antara <i>tax evasion</i> dan nilai perusahaan, sedangkan <i>ownership concentration</i> tidak mampu memoderasi hubungan tersebut
17.	Giannarakis (2014)	<i>Corporate Governance and Financial Characteristic Effects on the Extent of Corporate Social Responsibility Disclosure</i>	Variabel Dependen : <i>CSR Disclosure (ESG Disclosure Score)</i>  Variabel Independen : <i>Company Size, Financial Leverage, Profitability, CEO Duality, Board Size, Board</i>	Profitabilitas, ukuran perusahaan, dan komitmen CSR berpengaruh positif terhadap <i>ESG disclosure</i> , sedangkan <i>financial leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>ESG disclosure</i> .

No.	Peneliti	Judul penelitian	Variabel	Hasil penelitian
			<i>Meetings, Board Age, Women on Board, Board Composition, dan CSR Commitment</i>	
18.	Sudana dan Arlindania W. (2011)	<i>Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Go-Public di Bursa Efek Indonesia</i>	Variabel Dependen : <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i>  Variabel Independen : Dewan Direksi Wanita, Dewan Direksi Warga Negara Asing, Komposisi Komisaris Independen	Dewan direksi warga negara asing, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan ROE berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR, sedangkan dewan direksi wanita dan DER tidak berpengaruh signifikan.
19.	Clarkson et al. (2008)	<i>Revisiting the Relation Between Environmental Performancer and Environmental Disclosure: An Empirical Analysis</i>	Variabel Dependen : <i>Environmental Disclosure</i>  Variabel Independen : <i>Environmental Performancer</i>	<i>Environmental performancer</i> berpengaruh positif terhadap <i>environmental disclosure</i> . Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik cenderung mengungkapkan informasi lingkungan lebih luas.

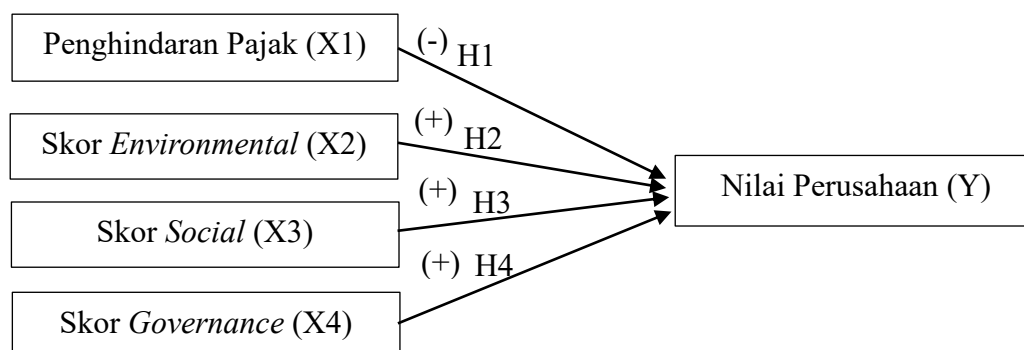
### 2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini teori *stakeholder* digunakan sebagai landasan utama, karena di dalam teori ini menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap aktivitas perusahaan (Edward Freeman John McVea et al. 2001). Dalam penelitian ini praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat menimbulkan persepsi negatif dari *stakeholder*, terutama pemerintah, investor, dan masyarakat, karena dianggap mengurangi kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara. Namun dengan penerapan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) dapat memperkuat legitimasi sosial perusahaan dan mengurangi risiko reputasi yang timbul akibat praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Menurut Elamer et al. (2024), praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan karena mengurangi transparansi dan meningkatkan risiko reputasi. Sebaliknya, ESG berperan dalam meningkatkan kepercayaan investor dan kualitas tata kelola perusahaan, sehingga berpotensi memberikan pengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Hubungan antar variabel digambarkan dalam kerangka pemikiran berikut :

**Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual**



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai perusahaan sebagai variabel dependen diasumsikan dipengaruhi oleh praktik penghindaran pajak dan Skor ESG (*Environmental, Social, Governance*) sebagai variabel independen. Berdasarkan penjelasan tersebut, diasumsikan bahwa penghindaran pajak dan ESG memiliki pengaruh langsung terhadap nilai perusahaan.

## **2.4 Perumusan Hipotesis**

### **2.4.1 Pengaruh Penghindaran Pajak terhadap Nilai Perusahaan**

Penghindaran pajak merupakan strategi manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum. Meskipun tidak melanggar hukum, praktik penghindaran pajak sering kali menimbulkan pandangan negatif dari para pemangku kepentingan karena dianggap mengurangi kontribusi perusahaan terhadap penerimaan negara dan juga tidak mencerminkan tanggung jawab sosial yang baik.

Menurut Elamer et al. (2024), praktik penghindaran pajak menurunkan nilai perusahaan karena dianggap menimbulkan risiko reputasi dan menurunkan tingkat transparansi. Hal ini juga sejalan dengan teori *stakeholder* yang menyatakan bahwa keberhasilan sebuah perusahaan tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, melainkan juga dari sejauh mana perusahaan memenuhi tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat.

Dengan demikian, perusahaan yang melakukan praktik penghindaran pajak secara berlebihan berisiko menurunkan kepercayaan investor dan reputasi perusahaan di pasar.

### **H1 : Penghindaran Pajak berpengaruh negatif terhadap Nilai Perusahaan**

#### **2.4.2 Pengaruh Skor *Environmental* terhadap Nilai Perusahaan**

Aktivitas operasional perusahaan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan sehingga perusahaan dituntut untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Xaviera et al. (2023), mengungkapkan bahwa aktivitas operasional perusahaan dapat menyebabkan masalah lingkungan yang berdampak pada perusahaan maupun masyarakat. Menurut Clarkson et al. (2008), skor lingkungan perusahaan merupakan hasil penilaian terhadap informasi yang tersedia untuk umum, seperti laporan tahunan, laporan keberlanjutan, dan situs web perusahaan. Pengungkapan informasi lingkungan tersebut mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab lingkungan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder*.

Sejalan dengan hal tersebut, Elamer et al. (2024), menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja ESG yang lebih baik cenderung memperoleh nilai perusahaan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, semakin baik kinerja lingkungan perusahaan maka semakin tinggi nilai perusahaan.

### **H2 : Skor *Environmental* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan**

#### **2.4.3 Pengaruh Skor *Social* terhadap Nilai Perusahaan**

Aspek sosial mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap karyawan, pelanggan, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurut Serafeim (2014), perusahaan yang meningkatkan kinerja sosialnya akan memiliki hubungan

yang lebih baik dengan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan konsep *doing well by doing good* yang menyatakan bahwa perusahaan yang memperhatikan aspek sosial dapat memperoleh dukungan dari *stakeholder*. Hubungan yang baik dengan *stakeholder* dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan investor terhadap perusahaan.

Sejalan dengan hal tersebut, Elamer et al. (2024), menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja ESG yang lebih baik cenderung memperoleh nilai perusahaan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, semakin baik kinerja sosial perusahaan maka semakin tinggi nilai perusahaan.

### **H3 : Skor *Social* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan**

#### **2.4.4 Pengaruh Skor *Governance* terhadap Nilai Perusahaan**

Tata kelola perusahaan merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas. Menurut Giannarakis (2014), perusahaan dengan kinerja tata kelola yang tinggi cenderung lebih transparan terhadap pemangku kepentingannya. Transparansi tersebut memungkinkan *stakeholder* untuk memantau kinerja perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik. Penerapan tata kelola yang baik dapat meningkatkan kepercayaan *stakeholder* dan mengurangi konflik kepentingan dalam perusahaan.

Sejalan dengan hal tersebut, Elamer et al. (2024), menunjukkan bahwa perusahaan dengan kinerja ESG yang lebih baik cenderung memperoleh nilai perusahaan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, semakin baik tata kelola perusahaan maka semakin tinggi nilai perusahaan.

### **H4 : Skor *Governance* berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan**